



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Pada Bencana Kekeringan Di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan)

Elvis Tampubolon ¹⁾; Ramadhan Pancasilawan ²⁾

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Email: ¹⁾ elvis20001@mail.unpad.ac.id; ²⁾ ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 Maret 2024]

Revised [30 Mei 2024]

Accepted [07 Juni 2024]

KEYWORDS

policy implementation, disaster
countermeasure, drought

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, dengan fokus pada Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan. Mengadopsi teori implementasi kebijakan publik oleh Diana M. DiNitto (2015), penelitian ini mengevaluasi aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan sikap implementor dalam upaya mengatasi dampak kekeringan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung penanggulangan bencana kekeringan, implementasinya belum optimal di Desa Suci. Meskipun aspek birokrasi dan sikap implementor telah dilaksanakan dengan baik, terdapat kekurangan dalam komunikasi antarpihak terkait dan alokasi sumber daya. Dari segi birokrasi dan sikap implementor, hasil menunjukkan adanya persepsi yang konsisten bahwa kekeringan merupakan bencana serius yang memerlukan tindakan cepat. Hal ini didukung oleh pembentukan Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana di Kabupaten Garut. Namun, kelemahan muncul pada aspek komunikasi, terutama dalam pertukaran informasi di awal penetapan status tanggap darurat. Ketidaksesuaian data wilayah terdampak antara BPBD Kabupaten Garut dan realitas di lapangan, khususnya di Desa Suci, mengakibatkan perpanjangan status tanggap darurat yang tidak sesuai dengan Standar Layanan BPBD Kabupaten Garut. Aspek sumber daya juga menjadi tantangan, meski upaya telah dilakukan untuk menyediakan sumber daya yang memadai. Upaya tersebut belum berhasil mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat, menunjukkan perlunya peninjauan ulang strategi alokasi sumber daya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perbaikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, dengan menyoroti area-area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal komunikasi dan pengelolaan sumber daya.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of policies regarding drought disaster mitigation in Garut Regency, focusing on Suci Village, Karangpawitan Subdistrict. Adopting Diana M. DiNitto's (2015) theory of public policy implementation, the research evaluates the aspects of communication, resources, bureaucracy, and implementor attitudes in addressing the impacts of drought. Research findings indicate that despite various policies being implemented to support drought disaster mitigation, the implementation has not been optimal in Suci Village. While aspects of bureaucracy and implementor attitudes have been executed well, there are deficiencies in communication among relevant parties and resource allocation. In terms of bureaucracy and implementor attitudes, the results show a consistent perception that drought is a serious disaster requiring swift action. This is supported by the establishment of the Drought Disaster Emergency Response Team and the Emergency Command Post in Garut Regency. However, weaknesses arise in communication, particularly in the exchange of information during the initial declaration of emergency status. Discrepancies in the data of affected areas between the Garut Regency Disaster Management Agency (BPBD) and the field reality, especially in Suci Village, result in the extension of the emergency response status beyond the Garut BPBD Service Standard. Resource allocation is also a challenge, despite efforts to provide adequate resources. These efforts have not effectively reduced the impacts of drought experienced by the community, indicating the need for a reassessment of resource allocation strategies. The research findings make a significant contribution to improving the implementation of drought disaster mitigation policies in Garut Regency, emphasizing areas that need improvement, particularly in communication and resource management.

PENDAHULUAN

Kekeringan adalah salah satu bencana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama sepuluh tahun terakhir Indonesia selalu mengalami bencana kekeringan setiap tahunnya. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, pada tahun 2023 telah terdapat lebih dari 2.276 desa yang terdampak kekeringan di Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara (Muhari 2023). Pada tahun 2023, kemarau panjang telah mengakibatkan bencana kekeringan di Jawa Barat semakin meluas. Hingga September 2023, kekeringan telah terjadi di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat. Berdasarkan informasi BPBD Jawa Barat, beberapa daerah terdampak tersebut adalah Kabupaten Garut, Bogor, Purwakarta, Majalengka, Subang, Sukabumi, Bandung Barat, Karawang, Cirebon dan Pangandaran (Amiril 2023). Sebanyak 129.314 keluarga di 268 desa dan 109 kecamatan mengalami kesulitan air bersih. Hal ini mendasari sejumlah daerah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, di antaranya adalah Kabupaten Garut. Bupati Garut menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak 28 Agustus 2023 sampai 10 September 2023 melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023. Namun, seiring dengan penanganan bencana kekeringan yang sedang berlangsung, terjadi penambahan wilayah yang terdampak bencana kekeringan menjadi 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Pakenjeng, Cigeduk, Peundeuy, Malangbong, Kadungora, Balubur Limbangan, Sucinaraja, Cikelet, Sukawening, Cibiuk, Pameungpeuk, Pasirwangi, Cilawu, Selaawi, Singaraja, Kersamanah, Cisompet, Caringin, dan Karangpawitan. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, setidaknya 51.657 jiwa atau sebanyak 17.529 kepala keluarga dilaporkan terdampak bencana kekeringan. Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah kekurangan air bersih. Kebutuhan air bersih dari daerah-daerah yang terdampak sebanyak 3,2 juta liter per dua minggu. Jumlah ini masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintah dengan berbagai pihak baru dapat mendistribusikan air bersih sebanyak 581 ribu liter. Kekeringan di Kabupaten Garut juga telah mengakibatkan sebanyak 620 hektare lahan pertanian mengalami kesulitan air dan 22 hektare di antaranya telah dipastikan gagal panen (Diskominfo Garut 2023). Desa Suci adalah salah satu desa terdampak bencana kekeringan di Kecamatan Karangpawitan. Desa yang berpenduduk sebanyak 14.285 jiwa ini mengalami kekurangan air bersih sejak Mei 2023. Kekurangan air bersih terjadi di beberapa rukun warga yang tersebar di 3 dusun. Menurut laporan Pemerintah Desa Suci, terdapat 154 kepala keluarga yang mengeluhkan terhentinya aliran air bersih di kediaman masing-masing. Terdapat pula Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disempurnakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai turunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di Kabupaten Garut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 juga mengatur pengelolaan bencana dalam tiga tahapan, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Dalam bukunya yang berjudul "*Understanding Public Policy*" (Dye 2017), Thomas R. Dye mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah. Lebih jauh, Dye menyatakan bahwa studi tentang kebijakan publik melibatkan analisis perilaku pemerintah, alasan di balik adopsi kebijakan tersebut, dan dampak-dampak yang timbul akibat kebijakan tersebut. R. S. Parker juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah tujuan khusus yang dikejar oleh pemerintah atau serangkaian prinsip dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam situasi tertentu atau sebagai respons terhadap situasi darurat pada suatu periode waktu tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (1980), sebagaimana yang disitir oleh (Abdoellah dan Rusfiana 2016), menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekadar proses transformasi keputusan politik menjadi tindakan rutin melalui struktur birokrasi. Lebih dari itu, pelaksanaan kebijakan melibatkan konflik, pengambilan keputusan, dan pertanyaan tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap yang terjadi setelah undang-undang diundangkan, yang memberikan wewenang untuk merencanakan, membentuk kebijakan, dan menghasilkan hasil nyata atau manfaat (Handoyo 2012).



Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam bukunya yang berjudul "*Social Welfare: Politics and Public Policy*", Diana M. DiNitto (2015) membahas bahwa seringkali kebijakan publik tidak sesuai dengan implementasinya. DiNitto menyajikan pandangannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yakni komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan sikap. Menurutnya, komunikasi yang baik, alokasi sumber daya yang cukup, birokrasi yang efisien, dan dukungan positif dari berbagai pihak sangat penting untuk membuat implementasi kebijakan pemerintah berhasil.

a. Komunikasi

Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada komunikasi yang baik antara para pelaksana kebijakan. Kebijakan yang sukses memerlukan petunjuk yang jelas dan konsisten agar dapat dipahami oleh para pelaksana. Komunikasi yang efektif dalam menyampaikan instruksi sangat penting untuk memastikan pemahaman peran dan tanggung jawab setiap pihak. Sebaliknya, komunikasi yang kurang jelas, kabur, atau bertentangan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana, menghambat optimalnya implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan, meski petunjuknya jelas, masih tergantung pada ketersediaan sumber daya bagi pelaksana kebijakan. Dana menjadi krusial sebagai sumber daya utama untuk menjalankan kebijakan. Namun, penting juga untuk memastikan ketersediaan sumber daya lain yang terkait, karena setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan.

c. Birokrasi

Implementasi kebijakan sangat terpengaruh oleh birokrasi. Meskipun birokrasi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan, namun sekaligus dapat menjadi hambatan yang signifikan. Semakin sederhana struktur birokrasi, semakin sedikit hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi. Sebaliknya, semakin banyak lembaga yang terlibat dan semakin independen kedudukan mereka, semakin besar kemungkinan munculnya masalah implementasi.

d. Sikap

Pelaksana kebijakan yang mendukung suatu kebijakan memiliki kemungkinan besar untuk melaksanakannya sesuai dengan niat pembuat kebijakan. Namun, jika sikap para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi bisa menjadi sulit karena tingkat diskresi yang bervariasi. Sikap mereka terhadap kebijakan dapat mempengaruhi cara program tersebut dijalankan, dan jika diminta untuk melaksanakan kebijakan yang tidak mereka setujui, penyimpangan dapat muncul dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis informasi, menggali lebih dalam data yang diberikan oleh informan, otoritas, atau hubungan-hubungan terkait dengan upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, khususnya Desa Suci. Penelitian ini menggunakan studi kasus dalam desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini dilakukan dengan analisis mendalam terhadap suatu kasus atau program yang memiliki batasan dalam hal waktu dan aktivitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Sugiyono (2019), melibatkan peneliti sebagai instrumen utama dan proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses dibandingkan dengan hasil penelitian dan memungkinkan interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian. Peneliti mengikuti teori panduan (*guidance theory*) dalam mempersempit cakupan penelitian, dengan mengadopsi model faktor implementasi yang dikemukakan oleh Diana M. DiNitto pada tahun 2015. Oleh karena itu, aspek-aspek yang akan diteliti dalam pelaksanaan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut akan mencakup elemen-elemen seperti:

- a. Komunikasi, yang mencakup adanya petunjuk serta kesesuaian petunjuk dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- b. Sumber daya, melibatkan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Birokrasi, dalam konteks ini mencakup instansi apa saja yang terkait beserta perannya masing-masing dan hierarki antarinstansi serta interaksi yang terbangun.
- d. Sikap, merujuk kepada persepsi dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan serta tujuan dari kebijakan.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik nonstatistik karena data yang diperoleh dari lapangan berbentuk narasi atau cerita, bukan berupa data numerik. Peneliti mengadopsi metode analisis data yang dimulai dengan merinci seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, dokumen resmi, gambar, dan rekaman suara juga dianalisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai sejak tahap pralaksanaan hingga penyelesaian penelitian. Proses analisis data berlangsung terus menerus hingga diperoleh hasil yang valid. Proses analisis data melibatkan beberapa langkah, termasuk pengorganisasian data, ekstraksi informasi, pengelompokan data, serta pengambilan kesimpulan dari data yang kemudian dapat dibagikan kepada pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Komunikasi

Aspek ini menilai bagaimana kualitas interaksi dan komunikasi antar pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam komunikasi akan terdapat arahan dan petunjuk untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak. Kebijakan akan terimplementasi dengan efektif bila dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakan itu sendiri (Edward III dalam Winarno, 2016).

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Garut Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Garut, maka bencana kekeringan yang terjadi telah menjadi bencana skala kabupaten dan perlu penanganan secepatnya. Sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, BPBD Kabupaten Garut telah melakukan pengkajian terhadap beberapa wilayah yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Garut. Menurut informasi dari Informan 1, pada tahap pengkajian, BPBD Kabupaten Garut menemukan ada 10 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan, yaitu Kecamatan Cigedung, Sukawening, Malangbong, Balubur Limbangan, Kadungora, Peundeuy, Pameungpeuk, Pakenjeng, Cikelet, dan Pasirwangi. Kesepuluh kecamatan ini pun masuk dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut.

Setelah diterbitkannya keputusan tersebut, maka BPBD Kabupaten Garut melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016. Dalam sistem komando penanganan darurat bencana ini dibentuk perangkat yang terdiri dari Posko PDB, Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, dan Pos Pendamping PDB. Pos-pos penanganan darurat bencana ini berfungsi sebagai pusat komando, informasi, dan koordinasi untuk menanggulangi bencana.

Dalam perjalanannya menanggulangi bencana kekeringan, Posko PDB Kekeringan menambahkan wilayah terdampak kekeringan dari semula 10 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Kecamatan terdampak yang bertambah adalah Kecamatan Cilawu, Selaawi, Sucinaraja, Cibiuk, Singajaya, Caringin, Kersamanah, Cisompet, dan Karangpawitan. Penambahan ini dilakukan atas temuan BPBD Kabupaten Garut berdasarkan laporan masyarakat. Keputusan menambahkan wilayah terdampak ini pun disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar dalam perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.687-BPBD/2023.

Pembentukan Posko PDB oleh BPBD Kabupaten Garut merupakan hal yang mendukung terjadinya komunikasi yang baik dalam proses penanggulangan bencana. Melalui Posko PDB ini juga dapat diberikan instruksi yang jelas dan terpusat kepada pihak-pihak terkait, seperti instruksi untuk pembelian air bersih dari PDAM, pengerahan truk tangki air bersih dari Dinas Pemadam Kebakaran, dan lainnya.

Namun, dalam proses komunikasi yang terjadi masih terdapat kekurangan. Hal ini dibuktikan dalam penambahan kecamatan terdampak kekeringan yang semula 10 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Tahapan sebelum penetapan status tanggap darurat bencana adalah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Dalam melakukan pengkajian dampak bencana kekeringan, BPBD Kabupaten Garut berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan perangkat desa di bawahnya untuk mengetahui kondisi di lapangan. Selain itu, BPBD Kabupaten Garut juga turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Tetapi, komunikasi yang terbentuk masih kurang baik dengan beberapa kecamatan sehingga hasil kajian dampak di beberapa kecamatan tidak tercatat dengan baik. Hal ini juga berimbas pada perpanjangan status tanggap darurat bencana dan juga perubahan rencana strategis penanggulangan bencana guna menyesuaikan dengan penambahan kecamatan yang terdampak.

Hal ini juga terlihat dari kurang baiknya komunikasi BPBD Kabupaten Garut dengan Pemerintah Desa Suci di Kecamatan Karangpawitan. Seperti dalam Keputusan Bupati Garut Tentang Perpanjangan Status Tanggap Bencana Kekeringan di Kabupaten Garut, Kecamatan Karangpawitan adalah salah satu



kecamatan yang ditambahkan kemudian ke dalam daftar kecamatan terdampak. Menurut Informan 3, Desa Suci telah mengalami kekeringan sejak Juni 2023. Namun, belum ada tindak lanjut dari BPBD Kabupaten Garut terhadap bencana kekeringan di Desa Suci, meski telah dilaporkan. Barulah ketika ada perpanjangan status tanggap darurat pada September 2023, ada bantuan dari BPBD Kabupaten Garut ke Desa Suci berupa pemberian pompa air dan tangki air kepada beberapa rukun warga.

Oleh karena itu, aspek komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut belum dilaksanakan dengan baik. Telah ada pedoman atau petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Belum ada komunikasi yang baik antara BPBD Kabupaten Garut dengan perangkat daerah dan perangkat desa di bawahnya, khususnya Pemerintah Desa Suci, sehingga ada ketidaksesuaian data dengan realitas di lapangan.

Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Aspek ini mencakup sumber daya pendanaan dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, pengerahan sumber daya pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam regulasi ini diatur bahwa untuk penanggulangan bencana dalam status tanggap darurat, dana yang digunakan bersumber dari dana siap pakai APBD Kabupaten Garut komponen Biaya Tak Terduga (BTT). Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 24, BNPB dan BPBD mendapatkan kemudahan akses terhadap pendanaan berupa:

- a. imigrasi, cukai, dan karantina;
- b. pengadaan barang/jasa; dan
- c. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.

Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk bencana kekeringan di Kabupaten Garut sebesar Rp2,1 miliar yang dialokasikan untuk pipanisasi sebesar Rp1,5 miliar dan sisanya untuk distribusi air bersih menggunakan truk tangki dan pemberian pompa air beserta tangki penampungan. Pelaksanaan pipanisasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri di 11 lokasi di 3 kecamatan, serta pendistribusian air bersih telah diberikan sebanyak 125 ribu liter yang bekerja sama dengan PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut.

Aspek Birokrasi

Aspek birokrasi menilai apakah birokrasi yang dibentuk antara pelaksana kebijakan telah mampu mendukung terlaksananya kebijakan secara efektif dan efisien.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dalam hal status tanggap darurat bencana berskala kabupaten dibentuk perangkat berupa Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Pos komando ini menjadi tempat bagi pelaksana penanggulangan bencana untuk berkumpul, menyusun strategi, dan melaksanakan penanggulangan bencana. Selain itu, keberadaan pos komando ini juga berfungsi sebagai wadah untuk memudahkan birokrasi penanggulangan bencana yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Dalam bencana kekeringan di Kabupaten Garut, setelah status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023, Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana Kekeringan langsung dibentuk di bawah komando Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut. Pos komando ini menjadi tempat berkumpulnya stakeholder penanggulangan bencana dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media, dan masyarakat.

Pelaksanaan birokrasi dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut diupayakan agar terlaksana secara tidak berbelit-belit karena situasi darurat bencana membutuhkan kecepatan regulasi dan eksekusi. Menurut Informan 2, dalam hal penganggaran, seluruh stakeholder penanggulangan bencana melakukan kajian terhadap peran masing-masing dan mengajukan anggaran kepada BPBD Kabupaten Garut. Kemudian, BPBD Kabupaten Garut secara kolektif menyerahkan

Rencana Anggaran Pembiayaan yang telah disusun Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan untuk dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui komponen Biaya Tak Terduga dari APBD Kabupaten Garut. Dengan demikian, masing-masing instansi tidak perlu mengajukan masing-masing dan memangkas waktu proses pencairan dana.

Birokrasi yang terjalin antara Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut dengan pemerintah desa juga dipermudah melalui pos komando ini. Kebutuhan air bersih dari tiap-tiap kecamatan dan desa yang terdampak dapat dilaporkan serta ditangani melalui satu pintu, yaitu Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut.

Aspek birokrasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan baik. Birokrasi disederhanakan melalui pos komando penanggulangan darurat bencana dan memiliki kemudahan terhadap beberapa akses yang menghasilkan gerakan pelaksana yang lebih cepat dan tepat.

Aspek Sikap

Aspek sikap ini berkaitan dengan persepsi dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan akan terwujud dengan baik apabila para pelaksana mendukung kebijakan dan melaksanakannya sesuai dengan niat pembuat kebijakan.

Bencana kekeringan di Kabupaten Garut telah terjadi sejak Maret 2023 dan terus berkepanjangan hingga akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya fenomena el nino yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Selain itu, menurut BNPB, Kabupaten Garut juga merupakan wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk kekeringan. Kekeringan yang terjadi juga meluas dari yang semula 10 kecamatan menjadi 19 kecamatan di seluruh Kabupaten Garut, serta mengakibatkan kekurangan air bersih serta kerusakan lahan pertanian yang luas. Oleh karena itu, penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilaksanakan secara cepat oleh seluruh pihak yang terlibat.

Menurut seluruh Informan, para pelaksana kebijakan mulai dari Pemerintah Kabupaten Garut, Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut, akademisi, media, dan masyarakat memiliki persepsi yang sama terhadap bencana kekeringan ini harus ditanggulangi dengan serius. Begitu juga dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh stakeholder, seluruh pihak memandang bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dan mendukung implementasinya.

Oleh karena itu, aspek sikap ini dipandang telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh unsur pelaksana kebijakan memiliki persepsi dan penerimaan yang sama terhadap bencana dan kebijakan penanggulangannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dengan studi pada bencana kekeringan di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan belum terlaksana dengan baik dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Diana M. DiNitto (2015). Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mendukung penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, tetapi masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berakibat pada kurang sempurnanya upaya meminimalisasi dampak bencana kekeringan yang dirasakan masyarakat.

Dari aspek birokrasi dan sikap pelaksana telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh pelaksana kebijakan memiliki persepsi yang sama bahwa bencana kekeringan ini adalah bencana yang telah merugikan banyak masyarakat, telah terjadi berkepanjangan sejak Maret 2023, dan harus ditangani dengan segera. Oleh karena itu, sikap ini didukung dengan pembentukan birokrasi yang mempermudah proses regulasi dan eksekusi oleh pelaksana kebijakan melalui pembentukan Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut dan Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana Kabupaten Garut.

Akan tetapi, dari aspek komunikasi dan sumber daya masih menunjukkan kekurangan. Komunikasi yang terjalin antarpihak yang terkait, khususnya di awal penetapan status tanggap darurat bencana



kekeringan tidak terlaksana secara baik. Akibatnya terdapat ketidaksesuaian antara data wilayah terdampak yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Garut dengan realitas masyarakat di lapangan, khususnya Desa Suci Kecamatan Karangpawitan yang ditambahkan kemudian. Kemudian, hal ini mengakibatkan perpanjangan status tanggap darurat yang semula 14 hari menjadi 28 hari, di mana hal ini tidak sesuai dengan Standar Layanan BPBD Kabupaten Garut.

Aspek sumber daya juga menjadi kekurangan dalam implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut. Meski Pemerintah Kabupaten Garut telah mengupayakan sumber daya yang dimiliki, tetapi seluruh upaya tersebut masih belum mampu untuk mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Garut melalui BPBD Kabupaten Garut melakukan kajian dan membuat peta wilayah rawan bencana kekeringan sampai di tingkat desa untuk mempermudah mitigasi di masa depan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Garut melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai untuk menanggulangi bencana kekeringan di masa yang akan datang, mengingat tingkat kerentanan terhadap bencana kekeringan di Kabupaten Garut yang tinggi.
3. Sebaiknya BPBD Kabupaten Garut membuat layanan pelaporan bencana yang dapat diakses langsung oleh masyarakat untuk melaporkan bencana yang terjadi agar mempermudah proses mitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Amiril, Ferri. 2023. "Update Jadwal Musim Hujan di Kabupaten Garut, Prediksi BMKG Lengkap dengan Ulasan Ahli." *TribunPriangan*. Diambil (<https://priangan.tribunnews.com/2023/10/10/update-jadwal-musim-hujan-di-kabupaten-garut-prediksi-bmkg-lengkap-dengan-ulasan-ahli>).
- BMKG. 2022. "Pandangan Iklim 2023 (Climate Outlook)." 1–23.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Vol. 12. Singapore: SAGE Publications Ltd.
- Daming, Mustabir, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, dan Rifdan Rifdan. 2021. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKASSAR RECOVER DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5(4):1475–81.
- DiNitto, Diana, dan David H. Johnson. 2015. *Social Welfare: Politics and Public Policy*, 8th edition. 8 ed. London: Pearson Education, Inc.
- Diskominfo Garut. 2023. "Bupati Garut Tinjau Kekeringan di Garut Selatan." *PORTAL JABARPROVGOID*. Diambil (<https://jabarprov.go.id/berita/bupati-garut-tinjau-kekeringan-di-garut-selatan-10768>).
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Hanapi. 2022. "Sebagai Daerah Rawan Bencana, Kabupaten Garut Bisa Lebih Menggiatkan Upaya Mitigasi." *Portal Wisata Garut*.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Dharmasraya: CV. Dharma Persada.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Muhari, Abdul. 2023. "Kekeringan Terjang Empat Kecamatan di Kabupaten Bogor." *BNPB*. Diambil (<https://www.bnpb.go.id/berita/kekeringan-terjang-empat-kecamatan-di-kabupaten-bogor>).
- Prasetyo, Andreas Yoga. 2023. "Bencana Kekeringan yang Makin Meluas di Indonesia." *KOMPAS*. Diambil (<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/28/bencana-kekeringan-yang-makin-meluas-di-indonesia>).
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11(1):1–12.
- Rofahan, Ahmad. 2023. "1.607 Bencana Terjadi di Jabar Sepanjang 2023." *medcom.id*.
- Seputra, Idham Imam. 2020. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan

- Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(2):408–20.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development): Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik (Edisi ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Uneputty, Lebrina. 2021. “Bencana Alam di Jawa Barat Capai 8.422 Kejadian dalam Kurun Waktu 6 Tahun.” *SuaraJabar.id*.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.